

BAB II

HISTORIS DAN DINAMIKA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Bab ini menguraikan bagaimana pendudukan Israel di wilayah Palestina terbentuk, berkembang, dan berubah sepanjang lebih dari satu abad. Fokus utamanya adalah menjawab pertanyaan apa yang menjadi akar konflik, siapa aktor-aktor yang berperan, kapan titik-titik eskalasi terjadi, di mana wilayah yang menjadi pusat pertentangan, mengapa kekerasan terus berulang, dan bagaimana dinamika politik serta identitas kolektif memengaruhi pola konflik hingga hari ini. Pembahasan ini dimulai dari fondasi historis yang membentuk struktur konflik, kemudian bergerak pada perkembangan kontemporer yang memperlihatkan perubahan orientasi politik dan keamanan, hingga mencapai telaah mengenai pola pikir strategis yang mengarahkan kebijakan negara.

Melalui penelusuran historis, analisis dinamika modern, dan pemahaman terhadap konstruksi budaya strategis, bab ini memberikan kerangka menyeluruh untuk memahami bagaimana konflik ini tidak hanya bertahan, tetapi juga terus direproduksi melalui tindakan politik, kebijakan keamanan, dan narasi identitas. Penjelasan dalam bab ini menjadi dasar penting untuk menelaah intensi pendudukan serta bagaimana faktor budaya strategis memengaruhi pilihan-pilihan strategis aktor utama dalam konflik Israel–Palestina.

Peta Konflik Israel-Palestina



Sumber: Mapsland, *Large Map of Palestinian Loss of Land (1947–Present)*.

Konflik Israel–Palestina berkembang melalui rangkaian pergeseran politik dan teritorial yang panjang, sehingga peta wilayah yang kita kenal hari ini merupakan hasil dari proses historis yang sangat kompleks. Akar ketegangan tersebut dapat ditelusuri sejak akhir abad ke-19, ketika migrasi komunitas Yahudi ke Palestina meningkat bersamaan dengan munculnya gerakan nasionalisme Zionis (Gelvin, 2014). Pada masa Mandat Inggris, perubahan demografis yang cepat serta kebijakan kolonial yang ambivalen memperdalam ketidakpercayaan antara komunitas Arab Palestina dan

pemukim Yahudi, membentuk struktur awal sengketa atas tanah, kedaulatan, dan identitas politik (Morris, 2001).

Perubahan peta wilayah yang paling dramatis terjadi setelah Perang 1948. Deklarasi berdirinya Negara Israel dan pecahnya perang dengan negara-negara Arab mengakibatkan Israel menguasai sekitar 78 persen wilayah Palestina Mandat (Pappé, 2006). Bagi masyarakat Palestina, periode ini ditandai oleh eksodus massal sekitar 700.000 orang yang mengubah struktur sosial dan geografis komunitas mereka secara fundamental peristiwa yang kemudian dikenal sebagai *Nakba* (Masalha, 2012). Garis batas yang terbentuk pascaperang menjadi konfigurasi geopolitik utama kawasan hingga 1967 (Smith, 2010).

Fase berikutnya berlangsung pada Perang Enam Hari 1967, ketika Israel menduduki Tepi Barat, Yerusalem Timur, Gaza, Sinai, dan Dataran Golan dalam waktu singkat (Gelvin, 2014). Pendudukan inilah yang kemudian membentuk anatomi utama konflik kontemporer, karena sejak saat itu pengelolaan wilayah tidak hanya mencerminkan batas-batas administratif tetapi juga relasi kekuasaan, baik melalui pos-pos militer, perluasan permukiman, maupun pengaturan mobilitas penduduk Palestina (Gordon, 2008).

Memasuki akhir 1980-an, Intifada Pertama memperlihatkan akumulasi frustrasi masyarakat Palestina di bawah pendudukan yang semakin ketat. Meskipun tidak menghasilkan perubahan formal pada batas wilayah, struktur kontrol Israel di lapangan menjadi semakin mengakar melalui regulasi keamanan dan pembatasan ruang gerak (Thrall, 2017). Intifada Kedua pada awal 2000-an memperdalam pembelahan ini.

Pembangunan *Separation Barrier* serta pengaturan wilayah administratif di Tepi Barat menghasilkan lanskap geografis baru yang menentukan alur mobilitas, akses sumberdaya, dan kehidupan sosial-politik Palestina (UN OCHA, 2009).

Gaza kemudian berkembang menjadi kasus tersendiri dalam dinamika konflik Israel–Palestina. Meskipun penarikan militer Israel pada tahun 2005 kerap dipersepsikan sebagai bentuk pengakhiran pendudukan secara formal, penulis berargumen bahwa langkah tersebut tidak merepresentasikan perubahan substantif dalam relasi kekuasaan antara Israel dan Gaza. Kontrol Israel atas wilayah udara, perairan, serta sebagian besar akses perbatasan Gaza menunjukkan bahwa penarikan pasukan lebih bersifat restrukturisasi mekanisme penguasaan dibandingkan pelepasan kendali secara nyata (B'Tselem, 2017). Dengan kata lain, pendudukan tidak dihapuskan, melainkan dimodifikasi ke dalam bentuk kontrol jarak jauh (*remote control occupation*).

Setelah Hamas mengambil alih pemerintahan Gaza pada tahun 2007, blokade yang diberlakukan Israel semakin mempertegas pola tersebut. Penulis memandang bahwa blokade tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keamanan untuk membatasi kemampuan militer Hamas, tetapi juga sebagai strategi politik dan teritorial yang bertujuan mempertahankan dominasi Israel tanpa keterlibatan administratif langsung. Siklus eskalasi militer yang berulang, termasuk operasi besar pada 2008–2009, 2012, dan 2014, memperlihatkan konsistensi pendekatan keamanan Israel yang menempatkan penggunaan kekuatan sebagai sarana utama pengelolaan ancaman dari Gaza (Shlaim, 2014). Dalam konteks ini, Gaza dapat dipahami sebagai laboratorium

kebijakan keamanan Israel, di mana kontrol teritorial tidak selalu diwujudkan melalui kehadiran militer permanen, melainkan melalui kombinasi blokade, operasi militer periodik, dan pengendalian ruang strategis. Penulis berargumen bahwa pola ini mencerminkan orientasi budaya strategis Israel yang menekankan *security through dominance*, yakni keyakinan bahwa keamanan nasional hanya dapat dijamin melalui kontrol menyeluruh terhadap lingkungan strategis, meskipun tanpa pendudukan fisik secara langsung. Oleh karena itu, kasus Gaza memperkuat argumen bahwa kebijakan Israel tidak dapat dilepaskan dari budaya strategis yang memandang ancaman sebagai kondisi permanen dan menjustifikasi penggunaan kekuatan secara berulang sebagai respons yang sah.

Memasuki periode 2022–2024, dinamika konflik kembali mengalami perubahan signifikan. Ketegangan di Sheikh Jarrah dan kompleks Al-Aqsa pada 2021 menegaskan bahwa sengketa atas ruang permukiman, rumah, dan situs suci tetap menjadi pemicu friksi utama (Human Rights Watch, 2021). Eskalasi besar pada Oktober 2023 dan operasi militer Israel selanjutnya mengakibatkan perubahan drastis pada kondisi infrastruktur, distribusi penduduk, dan struktur pemerintahan lokal di Gaza (International Crisis Group, 2023). Dalam periode ini, praktik militer dan kebijakan keamanan Israel menunjukkan konsistensi dengan pola budaya strategisnya yang menekankan orientasi defensif-ofensif serta kontrol ketat atas wilayah yang dianggap vital bagi keamanan nasional (Inbar & Shamir, 2021)

Melihat keseluruhan rangkaian tersebut, menjadi jelas bahwa peta konflik Israel–Palestina bukanlah entitas statis. Peta konflik selalu berubah sesuai dinamika

politik, militer, dan sosial yang terjadi selama lebih dari satu abad. Dari masa Mandat Inggris hingga eskalasi terbaru, transformasi tersebut menunjukkan bahwa konflik ini dibentuk oleh interaksi antara klaim historis, strategi keamanan, praktik pendudukan, dan dinamika internal kedua masyarakat. Peta yang terbentuk hari ini mencerminkan bagaimana perebutan atas ruang telah menjadi inti dari konflik yang terus berlanjut hingga saat ini.

2.1 Terbentuknya Negara Israel dan Pembentukan Budaya Strategis Israel

Pembentukan Negara Israel pada tahun 1948 tidak dapat dipahami semata sebagai hasil dari keputusan politik internasional atau dinamika pasca-Perang Dunia II, melainkan sebagai puncak dari proses historis panjang yang membentuk identitas nasional, orientasi keamanan, dan pola pikir strategis negara tersebut. Akar pembentukan Israel berkaitan erat dengan perkembangan gerakan Zionisme modern pada akhir abad ke-19, yang mengartikulasikan gagasan pendirian negara Yahudi sebagai respons terhadap pengalaman panjang diskriminasi, penganiayaan, dan marginalisasi terhadap komunitas Yahudi di Eropa. Theodor Herzl, melalui karyanya *Der Judenstaat* (1896), menegaskan bahwa keselamatan dan keberlangsungan bangsa Yahudi hanya dapat dijamin melalui kedaulatan teritorial sendiri, sebuah gagasan yang kemudian menjadi fondasi ideologis negara Israel.

Proses institusionalisasi gagasan tersebut memperoleh legitimasi internasional melalui Deklarasi Balfour tahun 1917 dan Mandat Palestina di bawah Inggris, yang membuka ruang bagi migrasi Yahudi secara masif ke wilayah Palestina. Periode

Mandat Inggris (1922–1948) menjadi fase krusial dalam pembentukan struktur politik dan militer komunitas Yahudi, termasuk pembentukan organisasi pertahanan seperti *Haganah*, *Irgun*, dan *Lehi*. Menurut Morris (2001), organisasi-organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan etos militer dan disiplin kolektif yang kemudian diwariskan ke dalam institusi negara Israel pasca-kemerdekaan.

Proklamasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948 dan pecahnya Perang Arab–Israel pertama memperkuat persepsi ancaman eksistensial dalam memori kolektif Israel. Perang tersebut tidak hanya menjadi momen kelahiran negara, tetapi juga pengalaman formatif yang membentuk keyakinan bahwa keberlangsungan Israel senantiasa berada dalam kondisi terancam. Seperti dijelaskan oleh Shlaim (2000), kemenangan militer Israel dalam perang 1948 menegaskan dua pelajaran strategis utama: pertama, bahwa kekuatan militer merupakan instrumen vital bagi kelangsungan negara; kedua, bahwa kontrol teritorial memiliki nilai strategis dan simbolik yang tidak terpisahkan dari keamanan nasional.

Pengalaman historis tersebut kemudian berkontribusi pada pembentukan budaya strategis Israel yang berorientasi pada *security through strength*. Budaya ini ditandai oleh keyakinan bahwa lingkungan strategis Israel bersifat bermusuhan, tidak stabil, dan cenderung mengancam eksistensi negara. Dalam kerangka *strategic culture* Johnston (1995), asumsi mengenai sifat konflik dan lingkungan strategis Israel dibentuk oleh trauma kolektif seperti Holocaust, perang-perang regional dengan negara Arab, serta pengalaman isolasi diplomatik pada fase awal berdirinya negara. Faktor-

faktor ini menghasilkan preferensi kebijakan yang menekankan penggunaan kekuatan militer secara pre-emptive dan dominasi teritorial sebagai strategi utama bertahan hidup.

Selain faktor keamanan, pembentukan budaya strategis Israel juga dipengaruhi oleh konstruksi identitas nasional dan narasi historis-religius. Konsep *Eretz Yisrael* (Tanah Israel) dan gagasan *Promised Land* tidak hanya berfungsi sebagai simbol keagamaan, tetapi juga sebagai sumber legitimasi politik dan strategis atas klaim teritorial. Peleg (2021) menjelaskan bahwa narasi tersebut terinternalisasi dalam diskursus negara dan menjadi bagian dari justifikasi moral terhadap kebijakan pendudukan, khususnya di wilayah yang dianggap memiliki signifikansi historis dan religius seperti Yerusalem Timur dan Tepi Barat.

Dalam praktiknya, budaya strategis Israel terinstitusionalisasi melalui kebijakan keamanan nasional, doktrin militer, dan pendidikan kewarganegaraan. Kimmerling dan Migdal (2003) menunjukkan bahwa militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang membentuk identitas kolektif warga negara Israel. Wajib militer dan pengalaman perang menjadi mekanisme penting dalam mentransmisikan nilai-nilai strategis, termasuk persepsi ancaman permanen, legitimasi penggunaan kekuatan, dan prioritas keamanan di atas pertimbangan politik lainnya.

Dengan demikian, terbentuknya negara Israel dan pembentukan budayanya merupakan proses yang saling berkaitan dan berkelanjutan. Negara Israel tidak hanya lahir dari konflik, tetapi juga membangun identitas dan budaya strategisnya melalui

konflik tersebut. Budaya strategis yang terbentuk sejak fase awal pendirian negara terus direproduksi dan beradaptasi dalam menghadapi dinamika kontemporer, termasuk dalam kebijakan pendudukan terhadap wilayah Palestina. Pemahaman atas proses ini menjadi penting untuk menjelaskan mengapa Israel mempertahankan pola kebijakan keamanan yang konsisten, serta bagaimana intensi pendudukan tidak dapat dilepaskan dari fondasi historis dan kultural negara tersebut.

2.2 Sejarah Konflik Israel-Palestina

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu sengketa geopolitik paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern. Akar konflik ini dapat ditelusuri secara historis melalui dokumen-dokumen resmi dan arsip kolonial yang terdokumentasi dengan baik. Awal mula ketegangan bermula pada Deklarasi Balfour tahun 1917, ketika Pemerintah Britania Raya menyatakan dukungannya terhadap pendirian “tanah air nasional bagi bangsa Yahudi” di Palestina sebuah wilayah yang pada saat itu masih dihuni mayoritas penduduk Arab.

Dukungan tersebut kemudian diformalisasi melalui Mandat Palestina yang diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa kepada Britania Raya pada tahun 1922. Selama periode mandat ini, imigrasi Yahudi meningkat secara signifikan. Laporan Komisi Peel (1937) menunjukkan lonjakan imigran Yahudi dari sekitar 4.075 orang pada tahun 1922 menjadi lebih dari 384.000 pada tahun 1936, memicu ketegangan dengan komunitas Arab setempat dan memuncak dalam Revolusi Arab 1936–1939. Fase ini dipandang sebagai periode penting dalam pembentukan pola konflik struktural antara

komunitas Arab Palestina dan pemukim Yahudi. Khalidi (1997) dan Morris (2001) menekankan bahwa akar ketegangan tidak hanya berasal dari perubahan demografis, tetapi juga dari kebijakan Mandat Inggris yang dianggap lebih menguntungkan proyek Zionis dibanding kepentingan politik masyarakat Arab. Ketidakseimbangan ini menimbulkan persepsi ancaman terhadap hak politik, kepemilikan tanah, serta identitas kolektif penduduk Arab. Dampaknya, menurut Gelvin (2014), adalah munculnya gerakan perlawanan yang lebih terorganisir, sementara represi Inggris melemahkan kepemimpinan politik Palestina. Pada saat yang sama, Kimmerling dan Migdal (2003) mencatat bahwa pemberontakan tersebut justru memperkuat kemampuan organisasi militer Yahudi, seperti Haganah, yang memainkan peran utama dalam perang 1948. Dengan demikian, periode ini dipahami sebagai fase yang membentuk struktur kekuatan dan pola konflik yang berlanjut hingga masa modern.

Pada 29 November 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Resolusi 181 (II) yang merekomendasikan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara terpisah, dengan alokasi sekitar 55 persen wilayah untuk negara Yahudi dan 45 persen untuk negara Arab, sementara Yerusalem ditempatkan di bawah administrasi internasional. Proposal ini diterima oleh kepemimpinan Yahudi, namun ditolak oleh negara-negara Arab dan elite politik Palestina. Penolakan tersebut terutama didorong oleh ketidakseimbangan pembagian wilayah yang dinilai tidak merefleksikan komposisi demografis saat itu, di mana komunitas Yahudi yang masih merupakan minoritas populasi justru memperoleh porsi teritorial yang lebih besar, serta oleh kekhawatiran terhadap arah ekspansi teritorial gerakan Zionis (Khalidi, 2007).

Penulis berargumen bahwa Resolusi 181 tidak hanya menjadi pemicu eskalasi konflik bersenjata, tetapi juga membentuk kerangka kognitif awal yang memengaruhi cara masing-masing pihak memaknai legitimasi, kedaulatan, dan penggunaan kekuatan. Bagi komunitas Yahudi, resolusi tersebut dipahami sebagai pengakuan internasional atas hak negara dan legitimasi politik yang harus diamankan melalui kekuatan militer jika diperlukan. Sebaliknya, bagi masyarakat Arab Palestina, resolusi ini dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang dilegalkan oleh komunitas internasional, sehingga memperkuat resistensi terhadap implementasinya. Perbedaan persepsi ini menciptakan kondisi konflik yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik dan ideologis.

Selain itu, pengunduran bertahap otoritas Inggris menjelang berakhirnya Mandat Palestina memperburuk situasi keamanan dan mempercepat eskalasi kekerasan komunal. Kekosongan otoritas tersebut tidak hanya menciptakan vacuum of power, tetapi juga membuka ruang bagi aktor-aktor bersenjata non-negara untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memaksakan klaim teritorial melalui kekerasan. Morris (2004) menunjukkan bahwa dalam kondisi tanpa otoritas sentral yang efektif, logika *self-help* menjadi dominan, mendorong kedua komunitas untuk mengandalkan kekuatan militer sebagai sarana utama mempertahankan kepentingan mereka.

Dalam konteks pembentukan budaya strategis Israel, penulis berargumen bahwa pengalaman periode 1947–1948 berperan sebagai fondasi historis yang membentuk persepsi ancaman eksistensial dan preferensi terhadap penggunaan kekuatan sebagai instrumen legitimasi negara. Resolusi 181 dan kekerasan yang

menyertainya tidak hanya menghasilkan batas teritorial baru, tetapi juga mewariskan pola pikir strategis yang memandang konflik sebagai kondisi permanen dan keamanan sebagai tujuan utama yang harus dijaga melalui dominasi militer. Pola inilah yang kemudian terinternalisasi dalam budaya strategis Israel dan terus memengaruhi orientasi kebijakan keamanan serta intensi pendudukan pada periode-periode berikutnya (Shlaim, 2000; Johnston, 1995).

Literatur akademik memandang periode 1947–1948 sebagai titik krusial yang menandai transisi konflik dari ketegangan komunal menjadi perang antar-negara. Morris (2004) menjelaskan bahwa dinamika “*intercommunal warfare*” yang telah berkembang sejak 1930-an mencapai puncaknya setelah resolusi pembagian dikeluarkan, sementara Khalidi (2007) menyoroti fragmentasi politik dalam kepemimpinan Arab-Palestina yang melemahkan kapasitas mereka merespons perubahan geopolitik yang cepat. Pappé (2006) juga menekankan bahwa ketidaksetaraan politik dan militer antara komunitas Yahudi dan Arab berkontribusi terhadap percepatan pecahnya konflik bersenjata.

Setelah proklamasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948, koalisi militer negara-negara Arab, Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak melancarkan operasi militer yang memicu Perang Arab–Israel pertama. Konflik ini berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Gencatan Senjata tahun 1949, yang menghasilkan Garis Hijau (*Green Line*) sebagai batas de facto negara Israel. Perang tersebut membawa dampak kemanusiaan yang besar, ditandai dengan eksodus massal sekitar 726.000

penduduk Palestina yang kemudian dikenal sebagai *Nakba*, sebagaimana dicatat oleh United Nations Relief and Works Agency (UNRWA, 2023).

Penulis berargumen bahwa perang 1948 tidak hanya menjadi peristiwa pendiri negara Israel, tetapi juga berfungsi sebagai pengalaman formatif yang membentuk orientasi keamanan dan budaya strategis Israel sejak fase awal berdirinya negara. Kemenangan Israel dalam perang ini memperkuat keyakinan elite politik dan militer bahwa keberlangsungan negara hanya dapat dijamin melalui superioritas militer dan kesiapan penggunaan kekuatan secara berkelanjutan. Dalam kerangka budaya strategis, pengalaman ini menanamkan persepsi bahwa konflik dengan lingkungan regional bersifat struktural dan berulang, sehingga keamanan nasional dipandang sebagai prioritas absolut yang mengesampingkan kompromi politik jangka panjang.

Selain itu, *Nakba* tidak hanya menciptakan krisis kemanusiaan bagi masyarakat Palestina, tetapi juga berkontribusi pada fragmentasi sosial-politik yang melemahkan kapasitas kolektif Palestina dalam merespons konsolidasi negara Israel. Kondisi ini secara tidak langsung memperkuat posisi strategis Israel dalam konfigurasi geopolitik kawasan pasca-1948. Gelvin (2014) menunjukkan bahwa hasil perang 1948 membentuk struktur geopolitik baru yang bersifat asimetris, di mana Israel muncul sebagai aktor negara yang terkonsolidasi, sementara Palestina terpecah secara teritorial dan politik.

Dalam perspektif penulis, struktur pascaperang ini memperkuat internalisasi logika *self-help* dan dominasi militer dalam kebijakan keamanan Israel. Garis Hijau sebagai batas *de facto* tidak dipahami sebagai batas final, melainkan sebagai hasil

sementara dari keseimbangan kekuatan yang dapat berubah melalui konflik berikutnya. Pola pemikiran ini kemudian tercermin dalam kebijakan ekspansi teritorial dan praktik pendudukan Israel pada dekade-dekade selanjutnya. Dengan demikian, perang 1948 tidak hanya meletakkan dasar konflik Israel–Palestina secara material, tetapi juga membentuk kerangka kognitif dan budaya strategis Israel yang terus memengaruhi intensi pendudukan hingga periode kontemporer (Shlaim, 2000; Johnston, 1995).

Tahap penting berikutnya terjadi pada Perang Enam Hari (Juni 1967), ketika Israel berhasil merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir, serta Dataran Tinggi Golan dari Suriah. Menurut banyak kajian sejarah, ketegangan pada periode ini terutama dipicu oleh meningkatnya rivalitas militer antara Israel dan negara-negara Arab, penutupan Selat Tiran oleh Mesir, pengerahan pasukan Mesir ke Sinai, serta penandatanganan pakta pertahanan Mesir–Yordania–Irak, yang dianggap Israel sebagai ancaman eksistensial langsung (Gelvin, 2014). Menanggapi hasil perang tersebut, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 242 (1967) yang menyerukan penarikan pasukan Israel dari wilayah yang didudukinya serta pengakuan terhadap kedaulatan dan keamanan semua negara di kawasan itu.

Dari beberapa sumber literatur akademik, Perang Enam Hari dilihat sebagai titik balik yang menginstitutionalisasi pendudukan sebagai struktur politik jangka panjang. Sejarawan seperti Ilan Pappé (2014) dan Avi Shlaim (2000) menyatakan bahwa kemenangan cepat Israel menciptakan asimetri kekuasaan baru yang memperkuat kontrol teritorial Israel sekaligus melemahkan kapasitas politik aktor-

aktor Arab. Sementara itu, Gershon Shafir dan Yoav Peled (2002) menunjukkan bahwa pendudukan pasca-1967 tidak hanya bersifat militer, tetapi juga menciptakan sistem administrasi dan pemukiman yang mengubah lanskap sosial-politik Palestina.

Selanjutnya, pada tahun 1987, terjadi Intifada Pertama, yaitu perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel di wilayah Tepi Barat dan Gaza. Menurut data B'Tselem (The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories), pemberontakan ini menewaskan sekitar 1.162 warga Palestina dan 160 warga Israel. Ketegangan yang memicu Intifada ini berkaitan dengan akumulasi frustrasi akibat dua dekade pendudukan, perluasan permukiman Israel, pembatasan mobilitas, serta ketidakadilan struktural yang dirasakan masyarakat Palestina di bawah administrasi militer Israel (Smith, 2010).

Intifada Pertama (1987–1993) dinilai sebagai salah satu mobilisasi rakyat terbesar dalam sejarah konflik modern, yang menandai pergeseran strategi perjuangan Palestina dari perang antar-negara menuju perlawanan sipil dan berbasis massa. Bentuk perlawanan dalam Intifada ini meliputi aksi mogok kerja, boikot ekonomi terhadap produk Israel, penolakan membayar pajak, demonstrasi massal, serta praktik pembangkangan sipil yang terorganisasi di tingkat komunitas lokal. Rashid Khalidi (2007) menekankan bahwa pola perlawanan semacam ini memperkuat identitas nasional Palestina dan memperluas partisipasi masyarakat sipil, sementara Charles Smith (2010) mencatat bahwa eskalasi perlawanan non-negara tersebut meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel, khususnya dari Amerika Serikat dan negara-

negara Eropa, karena eksposur global terhadap praktik represif Israel terhadap penduduk sipil.

Dampaknya sangat signifikan, Intifada Pertama mengubah dinamika politik kawasan, memaksa Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) memasuki proses negosiasi yang pada akhirnya melahirkan *Oslo Accords* 1993. Peristiwa ini juga menjadi titik awal transformasi strategi perjuangan Palestina dan menempatkan isu pendudukan sebagai agenda utama diplomasi internasional (Shlaim, 2000).

Perkembangan politik penting muncul dengan ditandatanganinya Perjanjian Oslo I (1993) antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Kesepakatan ini melahirkan Otoritas Palestina (Palestinian Authority) dan memberikan kerangka dasar untuk pemerintahan sendiri terbatas di sebagian wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Meskipun demikian, perluasan permukiman Israel tetap menjadi sumber ketegangan utama. Data Biro Pusat Statistik Israel (CBS) menunjukkan pertumbuhan populasi pemukim Yahudi di Tepi Barat dari sekitar 115.000 orang pada 1993 menjadi lebih dari 502.000 orang pada 2023, sementara Peace Now (2024) mencatat peningkatan pembangunan unit permukiman dari 3.645 unit pada 2021 menjadi 12.855 unit pada 2023. Ketegangan ini terutama dipicu oleh ketidakselarasan antara komitmen Oslo yang mensyaratkan penundaan aktivitas unilateral dan kebijakan perluasan permukiman yang dinilai menggerus wilayah yang menjadi landasan kemungkinan negara Palestina (Shlomo, 2019).

Fase pasca Oslo dinilai sebagai periode kontradiktif, di mana proses perdamaian institusional justru bersamaan dengan pendalaman kontrol struktural Israel

atas wilayah Palestina. Menurut Rashid Khalidi (2007), Oslo menciptakan “arsitektur administratif” yang membatasi yurisdiksi Otoritas Palestina dan menempatkan mereka dalam posisi bergantung pada Israel dalam aspek keamanan, fiskal, dan mobilitas. Gershon Shafir dan Yoav Peled (2002) berpendapat bahwa perluasan permukiman setelah Oslo bukanlah penyimpangan, tetapi bagian dari pola kebijakan yang memperkuat fragmentasi ruang Palestina dan mempersulit perwujudan solusi dua negara. Sedangkan literatur lain seperti Roy (1999) menunjukkan bahwa struktur ekonomi yang terbentuk pasca Oslo memperdalam ketimpangan dan ketergantungan ekonomi yang memicu frustrasi publik Palestina.

Dampaknya bersifat jangka panjang dan multidimensional. Secara politik, perluasan permukiman mempersempit wilayah yang secara realistis dapat dijadikan negara Palestina dan melemahkan kredibilitas perundingan baik di mata publik Palestina maupun aktor internasional (Smith, 2010). Secara sosial, meningkatnya operasi militer, pembatasan mobilitas, serta perubahan demografi di Area C memperkuat rasa kehilangan ruang hidup di masyarakat Palestina. Secara strategis, dinamika ini menimbulkan kebuntuan yang akhirnya menjadi salah satu faktor munculnya Intifada Kedua pada tahun 2000 (Khalidi, 2007). Dengan demikian, periode pasca Oslo tidak hanya menandai upaya institusional menuju perdamaian, tetapi juga memperlihatkan kontradiksi struktural yang memperdalam akar konflik.

Di Jalur Gaza, Israel memberlakukan blokade ketat setelah Hamas memenangkan pemilihan legislatif tahun 2006. Menurut UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), pembatasan awal terhadap 70 jenis

barang pada 2007 berkembang menjadi pelarangan hampir total ekspor pada 2010. Hingga 2023, sekitar 2,1 juta penduduk Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Serangkaian konflik bersenjata besar terus terjadi di wilayah ini, dengan dampak kemanusiaan yang masif. Berdasarkan data UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Operation Cast Lead (2008–2009) menewaskan 1.385 warga Palestina dan 13 warga Israel, sementara Operation Protective Edge (2014) mengakibatkan 2.251 korban di pihak Palestina dan 73 di pihak Israel. Konflik Mei 2021 juga menewaskan 256 warga Palestina dan 13 warga Israel. Rangkaian operasi militer ini dilihat sebagai manifestasi dari pola berulang yang ditandai oleh asimetri kekuatan, penggunaan kekuatan militer berskala besar oleh Israel, serta keterbatasan mekanisme perlindungan warga sipil di Gaza (B'Tselem, 2015).

Sejumlah kajian juga menyoroti bahwa tiap operasi militer tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan struktur pendudukan jangka panjang serta dinamika politik internal Israel dan Palestina. Menurut Sara Roy (2016), operasi militer memperdalam kondisi “*de-development*” di Gaza, yaitu kemerosotan sistematis terhadap kapasitas sosial-ekonomi masyarakat Palestina. Sementara itu, analisis oleh Nathan Thrall (2017) menunjukkan bahwa eskalasi kekerasan seringkali didorong oleh kebuntuan politik, stagnansi proses perdamaian, dan akumulasi tekanan struktural seperti blokade, pembatasan mobilitas, serta memburuknya kondisi kemanusiaan.

Dalam perspektif studi konflik, literatur juga menekankan bahwa siklus operasi militer Israel di Gaza menjadi indikator kegagalan mekanisme penyelesaian konflik, karena tiap putaran pertempuran cenderung menciptakan kondisi yang memfasilitasi eskalasi berikutnya (Lustick, 2019). Kajian-kajian tersebut sepakat bahwa dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa korban jiwa, tetapi juga kerusakan infrastruktur, trauma sosial, kemunduran institusi publik Palestina, serta membesarnya ketidakpercayaan politik di kedua pihak menyebabkan faktor-faktor yang memperpanjang konflik dan memperumit upaya diplomasi jangka panjang.

Rangkaian panjang peristiwa ini memperlihatkan pola kekerasan yang berulang dan pendekatan militeristik yang konsisten dalam merespons ancaman. Sejak awal berdirinya negara, keamanan nasional telah menjadi pusat orientasi politik Israel, membentuk cara pandang bahwa ancaman terhadap wilayah dan identitas nasional hanya dapat diatasi melalui kekuatan pertahanan yang tangguh. Pola inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pembentukan pandangan strategis Israel terhadap konflik dengan Palestina suatu pandangan yang menempatkan kontrol teritorial dan dominasi keamanan sebagai elemen utama kelangsungan negara.

2.3 Dinamika Konflik Israel-Palestina pada Tahun 2022-2024

Periode 2022–2024 menandai fase baru dalam evolusi konflik Israel–Palestina, ditandai oleh transformasi politik dan ideologis di Israel serta fragmentasi kepemimpinan di Palestina. Pemerintahan koalisi sayap kanan di bawah Benjamin

Netanyahu membawa orientasi baru dalam kebijakan keamanan dan teritorial Israel, di mana ideologi nasionalisme religius dipadukan dengan doktrin keamanan ekspansionis (Human Rights Watch, 2024). Arah kebijakan ini mencerminkan pergeseran dalam budaya strategis Israel dari paradigma pertahanan diri menuju paradigma aneksasional yang lebih agresif. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran pada *behavioral preferences*, yakni pola tindakan strategis yang berulang di mana dominasi teritorial dipersepsikan sebagai syarat mutlak bagi kelangsungan eksistensial negara.

Langkah konkret yang menggambarkan pergeseran tersebut terjadi pada 29 Mei 2023, ketika otoritas Israel memindahkan kewenangan administratif atas tanah dan permukiman di Tepi Barat dari yurisdiksi militer ke sipil. Menurut Human Rights Watch (2024), kebijakan ini secara efektif mengintegrasikan wilayah pendudukan ke dalam sistem pemerintahan domestik Israel, meski tetap menolak status hukum yang setara bagi warga Palestina. Council on Foreign Relations (2024) menafsirkan langkah tersebut sebagai bentuk aneksasi de facto, yang menandakan intensi strategis Israel untuk menormalisasi kontrol permanen atas wilayah pendudukan. Kebijakan ini didukung oleh narasi ideologis yang menempatkan Tepi Barat sebagai bagian integral dari *Eretz Yisrael*, tanah yang dijanjikan secara religius kepada bangsa Yahudi (European Union External Action Service, 2024). Dengan demikian, ekspansi teritorial Israel bukan hanya didorong oleh kalkulasi keamanan, tetapi juga oleh keyakinan ideologis yang berakar pada identitas nasional dan mitos historis.

Manifestasi paling nyata dari perubahan budaya strategis ini terlihat dari peningkatan masif pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

Berdasarkan data Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR, 2024), pada paruh pertama tahun 2023 pemerintah Israel mengesahkan pembangunan 12.855 unit hunian baru di Tepi Barat, angka tertinggi sejak Peace Now mulai mencatat proyek-proyek tersebut pada 2012. Laju pembangunan ini memperlihatkan bagaimana penguasaan lahan menjadi instrumen utama dalam menjamin keamanan jangka panjang dan memperkuat posisi tawar diplomatik Israel (Council on Foreign Relations, 2024). Dalam diskursus domestik, hal ini diperkuat oleh narasi “*fortress mentality*” atau “mentalitas benteng”, yakni keyakinan bahwa keamanan hanya dapat dijamin melalui kontrol sepihak, bukan melalui kompromi diplomatik (Amnesty International, 2024). Paradigma ini menegaskan karakter isolasionis dalam budaya strategis Israel kontemporer.

Hubungan antara budaya strategis dan struktur politik domestik Israel juga semakin jelas pada tahun 2023, ketika pemerintahan Netanyahu mengesahkan reformasi yudisial yang membatasi kewenangan Mahkamah Agung untuk menilai “*reasonableness*” keputusan eksekutif. Menurut Human Rights Watch (2024), reformasi tersebut disertai meningkatnya retorika diskriminatif dari pejabat koalisi dan insiden kekerasan terhadap kelompok minoritas, termasuk komunitas LGBTQ+. Hal ini menunjukkan bahwa budaya strategis ekspansionis Israel tidak hanya memengaruhi kebijakan luar negeri, tetapi juga menembus ranah politik domestik dengan memperkuat nasionalisme religius dan polarisasi sosial. Di pihak lain, kegagalan politik Otoritas Palestina memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap institusi

pemerintahan dan memperkuat basis sosial bagi kelompok bersenjata (The Century Foundation, 2025).

Secara regional, Timur Tengah pada periode ini ditandai oleh dua kecenderungan besar. Pertama, meningkatnya rivalitas antara blok pro-barat yang mencakup Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain melawan poros Iran-Suriah-Hizbullah-Hamas. Kedua, normalisasi hubungan melalui Abraham Accords yang memperluas jejaring diplomatik Israel (Council on Foreign Relations, 2024). Kombinasi dua dinamika ini menciptakan lingkungan strategis yang bertentangan, di satu sisi memberikan peluang diplomatik, namun di sisi lain memperkuat persepsi ancaman yang bersifat eksistensial. Netanyahu secara konsisten memanfaatkan situasi ini untuk mengukuhkan legitimasi domestik dan menjustifikasi kebijakan keamanan yang semakin ekspansionis.

Pidato-pidato resmi Benjamin Netanyahu selama periode 2022–2024 menunjukkan konsistensi naratif yang menempatkan Israel dalam posisi terancam secara permanen dan menegaskan pentingnya kekuatan militer serta kontrol teritorial sebagai jaminan utama keberlangsungan negara. Retorika ini memperlihatkan kontinuitas keyakinan kolektif yang membentuk orientasi budaya strategis Israel yakni pandangan bahwa keamanan nasional hanya dapat dijamin melalui kemandirian strategis dan dominasi militer yang kuat (Inbar, 2022).

Tabel 2.1 Retorika dan Justifikasi Pidato Benjamin Netanyahu

Forum Pidato	Statement Benjamin Netanyahu	Justifikasi
Sidang Umum PBB (UNGA transcript / media reporting)	“As long as I am Prime Minister of Israel, I will do everything in my power to prevent Iran from getting nuclear weapons.”	Menempatkan ancaman nuklir Iran sebagai masalah eksistensial. Membenarkan prioritas kebijakan keamanan luar negeri yang menekankan pencegahan, kemampuan pertahanan otonom, dan tindakan preventif.
Pernyataan resmi kantor perdana menteri / sidang kabinet (Prime Minister’s Office / PMO press release)	“Israel is fighting not only Hamas, but the entire axis of terror backed by Tehran.”	Membingkai ancaman lokal sebagai bagian dari jaringan ancaman regional. Mendukung legitimasi operasi militer yang luas dan tindakan keamanan yang diarahkan terhadap aktor-aktor yang dikaitkan secara geopolitik.

Wawancara / liputan media domestik (Channel 12 / Council on Foreign Relations reporting)	“The West Bank is Israel’s defense belt that cannot be negotiated.”	Menunjukkan korelasi langsung antara doktrin pertahanan dan klaim wilayah. Memposisikan Tepi Barat sebagai elemen strategis tak terpisahkan dari keamanan nasional, yang membatasi ruang kompromi politik.
Pernyataan publik (press coverage / settler media)	“This is the land of our fathers, this is our land. We are here to stay, forever. From these hills we can see the Land of Israel from one end to the other.”	Menekankan klaim historis/religius atas wilayah pendudukan. Berfungsi sebagai justifikasi moral untuk keberadaan permukiman dan integrasi wilayah ke dalam narasi identitas nasional.
Pidato pembukaan / pernyataan di forum internasional (The Times of Israel / UN reporting)	“My country is at war, fighting for its life.”	Melabelkan situasi sebagai perang eksistensial. Memperkuat pembenaran penggunaan kekuatan militer dan kebijakan keamanan

		darurat di hadapan audiens domestik dan internasional.
Herzliya Conference (conference reporting / Israel Policy Forum)	“Israel cannot afford to be complacent. Every generation must secure our independence again with strength and determination.”	Menguatkan retorika generasional tentang kewajiban mempertahankan kedaulatan. Mendukung narasi kontinuitas keamanan yang menjustifikasi investasi militer dan mitigasi risiko melalui kontrol wilayah.
Pernyataan di parlemen atau media yang dikutip (The Jerusalem Post / press)	“Our future depends on our strength, not on the promises of others.”	Mengartikulasikan sikap skeptis terhadap jaminan eksternal. Menegaskan prinsip kemandirian strategis (self-help) sebagai dasar kebijakan luar negeri dan aliansi pragmatis.
Press release / pengumuman operasi militer (PMO)	“A battle for the survival of the Jewish nation.” (merujuk pada pengumuman operasi militer besar)	Mengaitkan operasi militer dengan narasi eksistensial. Membenarkan mobilisasi militer besar-besaran dan pembatasan ruang diplomasi

		dalam konteks darurat nasional.
Pidato publik yang dilaporkan media (Haaretz / Times of Israel)	“The Jewish people have an eternal right to Judea and Samaria.” (.....)	Mempertegas elemen legitimasi historis dan religius terhadap wilayah tertentu. Mendukung argumentasi politik untuk mengenali atau mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam kebijakan nasional.

Sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber

Berdasarkan pemetaan retorika dan justifikasi yang disampaikan oleh Benjamin Netanyahu pada periode 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh narasi memiliki bobot strategis yang sama. Retorika tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni narasi yang bersifat krusial (foundational) dan narasi yang bersifat urgent (situasional), yang masing-masing memainkan peran berbeda dalam pembentukan dan reproduksi kebijakan keamanan Israel.

Narasi krusial merujuk pada retorika yang secara konsisten muncul lintas konteks dan waktu, serta berfungsi sebagai fondasi kognitif budaya strategis Israel. Dalam pidato Netanyahu, narasi mengenai ancaman eksistensial terhadap negara Israel menempati posisi paling sentral. Palestina khususnya Hamas, secara berulang

dikonstruksikan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup negara dan rakyat Israel, bukan sekadar aktor keamanan konvensional. Narasi ini diperkuat oleh penggunaan memori historis kolektif, termasuk rujukan implisit maupun eksplisit terhadap Holocaust dan pengalaman perang regional, yang menjustifikasi pandangan bahwa kompromi keamanan dipersepsikan sebagai risiko strategis. Selain itu, klaim mengenai hak historis dan moral Israel untuk mempertahankan diri juga tergolong krusial karena menjadi legitimasi normatif bagi penggunaan kekuatan militer secara berulang. Narasi-narasi ini bersifat struktural, berjangka panjang, dan terus direproduksi tanpa bergantung pada eskalasi tertentu.

Sementara itu, narasi yang mendesak bersifat kontekstual dan muncul sebagai respons langsung terhadap eskalasi kekerasan atau tekanan internasional tertentu. Retorika mengenai “operasi militer sebagai respons proporsional, penargetan spesifik terhadap kelompok militan, serta perlindungan warga sipil Israel” merupakan contoh narasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan militer dalam jangka pendek. Narasi ini sering kali dipadukan dengan upaya meredam kritik internasional, khususnya dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, dengan menekankan bahwa tindakan Israel bersifat defensif dan temporer. Berbeda dengan narasi krusial, narasi urgent cenderung berubah mengikuti dinamika konflik, namun tetap beroperasi di dalam kerangka budaya strategis yang telah mapan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa narasi krusial berfungsi membentuk *worldview* strategis Israel yang memandang konflik sebagai kondisi permanen dan keamanan sebagai tujuan absolut, sementara narasi yang mendesak

berfungsi sebagai instrumen legitimasi operasional atas kebijakan militer spesifik. Kombinasi kedua jenis narasi ini menunjukkan bahwa retorika Netanyahu tidak bersifat reaktif semata, melainkan mencerminkan budaya strategis yang terinternalisasi dan berperan penting dalam mempertahankan intensi pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Di ranah kebijakan, pola retorika tersebut berkontribusi pada meningkatnya militarisasi pengambilan keputusan, di mana pertimbangan diplomatik atau hukum internasional semakin tersisih oleh kerangka berpikir keamanan yang absolut. Sejumlah studi menunjukkan bahwa framing ancaman yang dilakukan elite politik dapat menciptakan kondisi yang disebut sebagai “*security trap*”, yaitu situasi di mana negara terus mengadopsi strategi yang lebih agresif karena merasa tidak memiliki alternatif lain (Bar-Joseph, 2020). Dalam konteks Israel, pola ini terlihat pada percepatan pembangunan permukiman, perluasan kontrol administratif Tepi Barat, serta penggunaan kekuatan militer yang lebih ofensif terhadap kelompok bersenjata Palestina.

Selain itu, narasi ancaman eksistensial yang terus-menerus direproduksi memperkuat delegitimasi terhadap aspirasi politik Palestina. Dalam berbagai forum internasional, Israel menggunakan narasi tersebut untuk menjustifikasi tindakan-tindakan yang dipandang sebagai bagian dari “*self-defense*”, meskipun mendapat kritik luas dari lembaga internasional mengenai proporsionalitas dan legalitasnya (Human Rights Watch, 2024). Dampak ini menciptakan kondisi negosiasi yang makin

asimetris, di mana tuntutan Palestina kehilangan ruang politik, sementara Israel semakin memperoleh legitimasi moral untuk mempertahankan kontrol teritorial.

Yang tidak kalah penting, retorika Netanyahu memperdalam fragmentasi internal Palestina. Dengan menempatkan seluruh aktor Palestina sebagai ancaman homogen, narasi tersebut melemahkan ruang bagi aktor-aktor moderat dan memperkuat kelompok yang mengadopsi perlawanan bersenjata. Studi oleh The Century Foundation (2025) menunjukkan bahwa semakin keras kebijakan keamanan Israel, semakin besar pula dukungan publik Palestina terhadap pendekatan konfrontatif, sehingga menciptakan siklus ketidakpercayaan yang berulang.

Secara keseluruhan, periode 2022–2024 mencerminkan transformasi budaya strategis yang memperkuat logika *zero-sum* dalam konflik Israel–Palestina. Putusan Mahkamah Internasional tahun 2024 yang menegaskan ilegalitas pendudukan dan pembangunan permukiman di wilayah Palestina memberikan legitimasi hukum internasional bagi posisi Palestina. Namun, Israel merespons tekanan eksternal dengan memperkuat aliansi strategis bersama Amerika Serikat (American-Jewish Committee, 2024). Kedua pihak kini terjebak dalam paradigma *conflict persistence*, di mana mempertahankan status quo lebih menguntungkan secara politik bagi elite kedua pihak dibandingkan risiko kompromi substantif yang diperlukan untuk perdamaian (The Century Foundation, 2025). Dengan demikian, dinamika budaya strategis pada periode ini tidak hanya merepresentasikan benturan dua identitas nasional, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sistem nilai, keyakinan ideologis, dan persepsi kolektif kedua pihak membentuk arah kebijakan dan memperpanjang konflik secara struktural.

2.4 Evolusi Budaya Strategis Israel: Dari Narasi Historis Menuju Orientasi Modern

Budaya strategis Israel merupakan hasil akumulasi pengalaman kolektif bangsa Yahudi yang terbentuk dari sejarah panjang penderitaan, pengusiran, dan perjuangan eksistensial. Trauma diaspora dan Holocaust menanamkan kesadaran mendalam akan kerentanan eksistensi nasional, yang kemudian menjadi fondasi utama bagi pembentukan identitas politik dan keamanan Israel (Kober, *Israel Affairs*, 2022). Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, paradigma keamanan nasional selalu diposisikan sebagai inti dari eksistensi negara. Dua elemen utama yang mendasarinya adalah memori eksistensial dan imperatif keamanan, yang menumbuhkan keyakinan bahwa ancaman terhadap Israel bersifat permanen dan total. Pandangan ini dikenal luas dalam literatur akademik sebagai “*Fortress Israel mentality*” suatu pola pikir yang memandang kelangsungan hidup negara hanya dapat dijamin melalui kekuatan militer dan kontrol penuh atas ruang strategis (Inbar & Shamir, *Strategic Culture and Israeli Security Policy*, 2021).

Secara historis, akar dari budaya strategis Israel dapat ditelusuri pada masa kepemimpinan David Ben-Gurion, yang memperkenalkan prinsip *Ein Brera* (“tidak ada alternatif”) sebagai pedoman utama kebijakan pertahanan. Prinsip ini menekankan bahwa Israel harus selalu siap bertindak secara unilateral, bahkan tanpa dukungan atau legitimasi internasional, apabila kelangsungan negara dianggap terancam (Bar-Joseph, *Journal of Strategic Studies*, 2020). Pola berpikir ini diwariskan lintas generasi elite

keamanan dan politik Israel, membentuk tradisi *self-reliance* yang kuat dan menjadikan penggunaan kekuatan militer sebagai instrumen utama dalam diplomasi dan keamanan.

Memasuki periode kontemporer (2022–2024), elemen-elemen budaya strategis tersebut mengalami revitalisasi di bawah pemerintahan Benjamin Netanyahu. Pemerintah koalisi sayap kanan tidak hanya melanjutkan warisan strategis tersebut, tetapi juga menggabungkannya dengan narasi teologis mengenai hak historis atas Tanah Israel (*Eretz Israel*). Dalam kerangka ini, wilayah Tepi Barat tidak lagi diperlakukan sebagai daerah sengketa, melainkan sebagai bagian integral dari proyek nasional dan spiritual bangsa Yahudi (Council on Foreign Relations, 2024). Dengan demikian, keamanan dan identitas tidak lagi dipisahkan, keduanya saling menguatkan dalam membentuk legitimasi atas kebijakan okupasi dan perluasan permukiman.

Evolusi budaya strategis ini juga ditandai oleh pergeseran wacana politik domestik. Koalisi kanan yang berkuasa pada periode 2022–2024 menginstitutionalisasi nilai-nilai ideologis ke dalam kebijakan negara. Dalam forum-forum publik seperti sidang Knesset dan Herzliya Conference, tokoh seperti Netanyahu dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich sering mengaitkan antara tanah, keamanan, dan identitas religius. Wacana tersebut menegaskan bahwa budaya strategis berfungsi bukan hanya sebagai kerangka interpretatif kebijakan, tetapi juga sebagai sarana legitimasi moral dan politik di tingkat domestik (Peace Now, 2024).

Konsistensi pola pikir strategis ini tergambar jelas dalam berbagai pernyataan publik Netanyahu. Dalam pidato Herzliya Conference (15 Mei 2022), Netanyahu

menegaskan bahwa “tidak ada perdamaian sejati tanpa keamanan yang mutlak,” menempatkan isu pertahanan di atas diplomasi. Sementara dalam wawancara dengan Channel 12 News (Oktober 2023), ia menyatakan bahwa “Tepi Barat adalah sabuk pertahanan Israel yang tidak dapat dinegosiasikan.” Puncaknya, dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-78 (22 September 2023), Netanyahu menegaskan: *“Israel will not wait for permission to defend itself against those who seek its destruction.”* Retorika ini mencerminkan kesinambungan antara trauma historis dan orientasi kebijakan modern, di mana narasi ancaman eksistensial terus digunakan sebagai legitimasi moral terhadap tindakan militer dan ekspansi teritorial.

Pola pikir elite Israel memperlihatkan internalisasi skema kognitif yang stabil yakni keyakinan bahwa keamanan hanya dapat dijamin melalui dominasi dan *deterrence*, bukan melalui kompromi. Keyakinan ini menjadi semacam “model berpikir” kolektif (collective cognitive model) yang mendorong persepsi terhadap ancaman dan pilihan kebijakan luar negeri. Dengan kata lain, kebijakan Israel terhadap Palestina bukan semata hasil kalkulasi rasional, tetapi produk dari struktur kognitif yang terbentuk melalui sejarah, identitas, dan pengalaman nasional.

Dengan demikian, evolusi budaya strategis Israel dari narasi historis menuju orientasi modern memperlihatkan kontinuitas antara masa lalu dan masa kini. Retorika keamanan, identitas religius, dan legitimasi historis berfungsi sebagai fondasi kognitif bagi pengambilan keputusan strategis, sekaligus menjelaskan mengapa kebijakan ekspansi dan kontrol teritorial terus dipertahankan meski menghadapi tekanan internasional. Dalam konteks inilah, budaya strategis Israel dapat dipahami sebagai

fenomena yang tidak hanya menjelaskan “apa yang dilakukan negara”, tetapi juga “mengapa elite Israel memersepsikan tindakan tersebut sebagai benar dan perlu”.